

ABSTRAK

Ermawati, Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Alam Lewaja Di Kabupaten Enrekang(Dibimbing oleh Muhammad Tahir dan Hardianto Hawing)

Implementasi Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya pengelolaan input untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum), baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Enrekang dalam pengelolaan destinasi wisata alam lewaja di kabupaten enrekang. Adapun jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif, jumlah informan yaitu 6 orang. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menggunakan teknik analisis data yaitu Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan atau verifikasi data, dan menggunakan pengabsahan data yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pemerintah yang diterapkan di permandian alam lewaja yaitu 1.) Komunikasi, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang dapat dikatakan sudah bagus karena dari pihak kantor Dinas selalu mementingkan komunikasi setiap bidang yang ada di kantor masing agar berjalan dengan sesuai dalam mewujudkan pelayanan yang bagus. 2.) Sumber Daya, pihak kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang dalam menyediakan sumber daya alam disetiap objek wisata supaya objek wisata masing-masing memiliki sumber daya alam yang bagus dalam menarik minat masyarakat yang datang untuk melakukan liburan, 3.) Disposisi (sikap pelaksana), oleh karena itu pihak kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sudah diberikan pelatihan tentang kebijakan pengembangan wisata yang ada di Kabupaten Enrekang, 4.) Struktur Birokrasi, dari pihak kantor Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dapat dikatakan bagus karena struktur Birokrasi yang ada di kantor Dinas sudah menerapkan struktur birokrasi yang sudah ditetapkan.

Kata Kunci : Implementasi, kebijakan, Pemerintah